

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Ekspor Barang Nasional	USD	USD300,42 miliar	USD75,11 miliar	USD66,85 miliar	89,01%
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	Persentase	85	20	20	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	Persentase	85	20	20	100
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Persentase	85	20	20	100
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan yang Baik					

4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Persentase	92	20	20	100
-----	---	------------	----	----	----	-----

Kinerja Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional ditunjukkan oleh indikator kinerja:

1. Nilai Ekspor Barang Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Ekspor Barang Nasional

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Sasaran strategis terwujudnya kebijakan fasilitasi perdagangan dan pengembangan ekspor selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengidentifikasi penyebab isu maupun permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan ekspor. Meskipun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan tren surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan nilai sebesar USD 66,85 miliar pada Triwulan I 2026, namun dalam situasi global yang tidak menentu perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi penurunan permintaan ekspor sehingga neraca perdagangan masih tumbuh positif.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 282,91 miliar atau naik 6,15 persen dibanding tahun 2024. Pada tahun 2025, ekspor dari 10 golongan barang nonmigas memberikan kontribusi 64,04% terhadap total ekspor nonmigas.

Realisasi Nilai Ekspor Barang Nasional pada periode Triwulan I 2026 dapat dilihat dari perhitungan berikut:.

$$\% \text{ capaian nilai ekspor barang} = \frac{\text{Realisasi Nilai Ekspor Barang}}{\text{Target Nilai Ekspor Barang}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja nilai ekspor barang nasional pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar USD300,42 miliar, mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, ditetapkan target kinerja per triwulan sebesar USD75,11 miliar, dengan mempertimbangkan pola historis kinerja ekspor yang umumnya mulai menunjukkan aktivitas sejak awal tahun.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi nilai ekspor barang nasional tercatat sebesar USD66,85 miliar atau tidak mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan sebesar USD75,11 miliar, sehingga persentase capaian kinerja Triwulan I 2026 mencapai 89% dari target. Ringkasan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	Capaian %
Indikator 1.1 Nilai Ekspor Barang Nasional	Nilai	Tahunan: USD 300,42 miliar Triwulan I: USD 75,11 miliar	USD 66,85 miliar	89%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target nilai ekspor barang nasional pada Triwulan I 2026 telah dilakukan serangkaian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut Pembelian Komoditas Pangan dari Amerika Serikat sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/1/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dashboard* Monitoring Ekspor dan Impor sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Teknis *Third Meeting of China-Indonesia TCTP Joint Working Committee* sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026 dan PED.02.02/04/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 4) Surat Permintaan Update TCTP sesuai surat Nomor B/PED/02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut implementasi MoU dan Potensi Pembelian Produk Pertanian AS dalam rangka Negosiasi Tarif Resiprokal dan Peluang Kerjasama *Business to Business* (B to B) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/06/D.III.M.EKON.3/02/2026.

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Izin Fasilitas KB dan Pemenuhan Kewajiban PT Golden Flower Tbk. sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/07/D.III.M.EKON.3/02/2026.
- 7) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026.
- 8) Surat Permintaan Data Perusahaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA) sesuai surat Nomor B/PED/02.02/08/D.III.M.EKON.3/02/2026.
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Progres/Tindak Lanjut Kerja Sama *Two Countries Twin Park* (TCTP) sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/11/D.III.M.EKON.3/03/2026.
- 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Sinkronisasi Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha Dalam Proses Penyelidikan Anti-Dumping dan CVD Terhadap CSV atau Solar Panel sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/1/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 11) Surat Permintaan Data Eksportir Hewan Primata dan Durian dalam rangka tindak lanjut kerjasama *Two Countries Twin Park* (TCTP) Indonesia dan RRT sesuai surat Nomor B/PED/02.01/12/D.III.M.EKON.3/03/2026.
- 12) Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Pembahasan *Counter Draft Arrangement Economic Partnership* (EGP) RI-Inggris sesuai nota dinas nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- 13) Penyampaian Nota Dinas Rapat Tim PKN atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan BMAD Sementara atas Impor Produk Hot Rolled Coil (HRC) asal WISCO, RRT sesuai nota dinas nomor PED.02.02/15/D.III.M.EKON.3/02/2026.
- 14) Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia pada Pertemuan Reguler *Dispute Settlement Body* (DSB) sesuai nota dinas nomor PED.02.02/20/D.III.M.EKON.3/02/2026.
- 15) Penyampaian Nota Dinas Rapat Penyusunan Rencana Aksi Sekretariat KNFP Tahun 2026 sesuai nota dinas nomor PED.02.02/23/D.III.M.EKON.3/02/2026.

Pencapaian kinerja triwulan I dapat berhasil karena dukungan dan kerja sama yang baik antara Keasdepan Fasilitas Perdagangan dengan berbagai stakeholder terkait antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga *National Single Window*, dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang mengampu perizinan berusaha yang telah membantu dan ikut serta dalam proses penyempurnaan kebijakan dan keikutsertaan dalam kegiatan beberapa Rapat Koordinasi yang telah diselenggarakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Nilai Ekspor Barang Nasional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Pertambangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 7 Januari 2026 (Zoom) 2. 23 Januari 2026 (Zoom) 3. 29 Januari 2026 (Zoom) 4. 3 Februari 2026 (Zoom) 5. 5 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian) 6. 5 Maret 2026 (Bogor) 7. 10 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian) 8. 12 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian)
2.	Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 16 s.d. 24 Tahun 2025 dan Perubahannya	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 4 Maret 2026 (Kemendag)
3.	Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 dan perubahannya	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 22 Januari 2026 (Kemendag) 2. 26 Februari 2026 (Kemendag) 3. 4 Maret 2026 (Kemendag) 4. 30 Maret 2026

4.	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Teknis Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA	Tertunda dan Digeser	Tertunda ke TW II mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya
5.	Koordinasi Evaluasi Dashboard Ekspor dan Impor	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 21 Januari 2026 (Kemenko Perekonomian) 2. 11 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian)
6.	Implementasi Program Kerja Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 22 Januari 2026 (Kemendag) 3. 12 Februari 2026 (Kemendag)
7.	Optimalisasi <i>Indonesia Single Risk Management</i> (ISRM) dalam Penerbitan Perizinan Ekspor dan Impor	Tertunda dan Digeser	Tertunda ke TW III mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring serta pelaksanaan monev melalui dashboard system yang tersedia dan permintaan data ke K/L terkait.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu hambatan rute pelayaran internasional, memperpanjang waktu pengiriman (*delay*), dan melonjakkan biaya pengapalan (*freight rate*).

2. Tingginya biaya energi global akibat konflik penutupan Selat Hormuz membatasi daya beli serta volume impor dari negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.
3. Momentum libur panjang Hari Raya Idulfitri di kuartal pertama memicu penghentian sementara operasional pada pabrik manufaktur dan aktivitas ekspor impor.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk penyelesaian hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi perjanjian perdagangan internasional (*Free Trade Agreement*) bersama kementerian teknis terkait;
2. Diperlukan koordinasi penyelarasan aturan Larangan Terbatas (Lartas) antar-Kementerian/Lembaga teknis untuk menghapus tumpang tindih perizinan yang menghambat proses ekspor dan impor.

2

Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor; dan
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Ekspor

Latar Belakang

Peningkatan ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan ekspor salah satunya diarahkan melalui penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Persentase efektivitas koordinasi menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan lintas sektor, mengingat tantangan ekspor saat ini bukan hanya bersumber dari faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, hambatan tarif dan non tarif, maupun ketidakpastian geopolitik, tetapi juga dari faktor internal berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur logistik, dan belum optimalnya integrasi data perdagangan.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor	Presentase	Tahunan: 85% Triwulan I: 20%	20%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Nota Dinas Usulan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (R-Permendag) di Bidang Ekspor dan R-Permendag di Bidang Impor sesuai nota dinas nomor PED.02.01/25/D.III.M.EKON.2/03/2026.
2. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Expo 2030 Riyadh sesuai nota dinas nomor PED.02.01/26/D.III.M.EKON.3/02/2026.
3. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026.
4. Surat Permintaan Data Eksportir Solar Panel ke AS sesuai surat Nomor B/PED/02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026.
5. Penyampaian Nota Dinas Laporan Audiensi Pembahasan Isu *Trade Remedies* Produk *Crystalline Silicone Photovoltaic Cells* (CSPV) sesuai nota dinas nomor PED.02.01/29/D.III.M.EKON.3/03/2026
6. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Sinkronisasi K/L dalam Proses Penyelidikan Anti Dumping dan CVD terhadap Produk Solar Panel RI sesuai nota dinas nomor PED.02.01/38/D.III.M.EKON.3/03/2026.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekspor	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketidakpastian kondisi perdagangan global, termasuk meningkatnya kecenderungan proteksionisme dan penerapan berbagai hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor yang mempengaruhi akses pasar produk Indonesia.
2. Persyaratan standar dan regulasi yang semakin ketat, seperti ketentuan keberlanjutan, ketertelusuran produk (*traceability*), dan standar lingkungan yang memerlukan penyesuaian dari pelaku usaha nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penguatan koordinasi dan integrasi antar kementerian/lembaga dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian hambatan ekspor secara cepat dan tepat sasaran;
2. Sosialisasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan terkait implementasi dan perkembangan kebijakan ekspor.

2.2 Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi dan

Pengendalian

Kebijakan terkait

dengan

Pengendalian Impor

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.2.Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor				
	Presentase	Tahunan: 85%	20%	100%
		Triwulan I: 20%		

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno TIm PKN atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan BMTP LLDPE sesuai nota dinas nomor PED.02.02/01/D.III.M.EKON.3/01/2026.
2. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Perkembangan dan Tindak Lanjut Pembelian Komoditas Pangan dari Amerika Serikat sesuai nota dinas nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026
3. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Penyusunan Draf SK Kelompok Kerja Pemenuhan Kebutuhan Komoditas Pangan oleh Kemenko Bidang Pangan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/07/D.III.M.EKON.3/01/2026.

4. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Lanjutan Negosiasi Tarif Resiprokal Amerika Serikat sesuai nota dinas nomor PED.02.03/08/D.III.M.EKON.3/01/2026.
5. Penyampaian Nota Dinas Penyampaian dan Permohonan Paraf Konsep Surat Sesmenko Bidang Perekonomian a.n. Menko Bidang Perekonomian Perihal Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan BMAD Kertas Dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/10/D.III.M.EKON.3/01/2026.
6. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Tim PKN atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan BMAD Sementara atas Impor Produk *Hot Rolled Coil* (HRC) asal Wuhan Iron and Steel Co. Ltd (WISCO) RRT sesuai nota dinas nomor PED.02.03/15/D.III.M.EKON.3/02/2026.
7. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Izin Fasilitas KB dan Pemenuhan Kewajiban PT Golden Flower Tbk sesuai nota dinas nomor PED.02.03/17/D.III.M.EKON.3/02/2026.
8. Penyampaian Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat Pengantar Deputi Perihal Masukan Dalam Rangka Penyusunan RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/18/D.III.M.EKON.3/02/2026.
9. Penyampaian Surat Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Pengenaan BMAD terhadap Impor Kertas Dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan sesuai surat nomor PI.02.03/13/M.EKON/02/2026.
10. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno Tim Tarif Pembahasan Pengenaan: (i) BMAD Sementara atas Impor Produk HRC asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd., RRT; dan (ii) BMTP atas Impor Produk LLDPE sesuai nota dinas nomor PED.02.03/22/D.III.M.EKON.3/02/2026.
11. Penyampaian Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Upaya Penguatan Efektivitas Kebijakan *Trade Remedies* sesuai nomor undangan PED.02.03/32/D.III.M.EKON/02/2026.
12. Penyampaian Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan RPermendag Impor sesuai nomor undangan PED.02.01/35/D.III.M.EKON/02/2026.
13. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Kajian Arah Pengembangan Industri TPT sesuai nota dinas nomor PED.02.03/24/D.III.M.EKON/02/2026.
14. Penyampaian Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Penyelidikan KADI terkait Pengenaan BMAD terhadap HRC asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. sesuai surat nomor PI.02.03/22/M.EKON/02/2026.
15. Penyampaian Nota Dinas Penyampaian dan Permohonan Paraf Konsep Surat Sesmenko Bidang Perekonomian a.n. Menko Bidang

Perekonomian Perihal Pertimbangan Atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan BMTP atas Impor Benang Stapel sesuai nota dinas nomor PED.02.03/34/D.III.M.EKON.3/03/2026.

16. Penyampaian Nota Dinas Penyampaian dan Permohonan Paraf Konsep Surat Sesmenko Bidang Perekonomian a.n. Menko Bidang Perekonomian Perihal Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Perpanjangan BMTP Produk Tirai sesuai nota dinas nomor PED.02.03/35/D.III.M.EKON.3/03/2026.
17. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno Pengharmonisasian atas RPMK terkait Pengenaan BMAD atas Impor Produk Canai Lantain Besi/Baja dan RPMK terkait Pengenaan BMAD atas Impor *Hot Rolled Coil* (HRC) sesuai nota dinas nomor PED.02.03/37/D.III.M.EKON.3/04/2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Melakukan Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Impor	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp10.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat, monitoring dan evaluasi serta kegiatan lain baik dengan pemerintah maupun asosiasi pelaku usaha yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom;
3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.3. Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Presentase	Tahunan: 80% Triwulan I: 20%	20%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor sesuai dengan surat undangan nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026.
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Teknis Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor tanggal 11 Februari 2026, sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/08/D.III.M.EKON.3/02/2026.
3. Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan *Counter Draft Arrangement Economic Growth Partnership* (EGP) RI-Inggris sesuai nota dinas nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026.
4. Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia pada Pertemuan Reguler *Dispute Settlement Body* (DSB) pada 11 Februari 2026 sesuai nota dinas nomor PED.02.02/20/D.III.M.EKON.3/02/2026.
5. Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Teknis Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor pada 24 Februari 2026 sesuai nota dinas nomor PED.02.02/21/D.III.M.EKON.3/02/2026.
6. Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Penyusunan Rencana Aksi Sekretariat KNFP Tahun 2026 pada 25 Februari 2026 sesuai nota dinas nomor PED.02.02/23/D.III.M.EKON.3/02/2026.
7. Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 *World Trade Organization* (WTO) pada 6 Maret 2026 sesuai nota dinas PED.02.02/27/D.III.M.EKON.3/03/2026.
8. Penyampaian Surat Permohonan Usulan Anggota Tim Koordinasi Optimalisasi *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor sesuai dengan surat nomor B/PED.02.02/06/D.III.M.EKON.3/01/2026.

9. Penyampaian Surat Permohonan User Akses Login Dashboard Monitoring Ekspor dan Impor sesuai dengan surat nomor B/PED.02.02/15/D.III.M.EKON.3/03/2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Terlaksana	2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya komitmen kementerian/lembaga teknis dalam mengintegrasikan sistem perizinan sektoral ke dalam skema *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) dan *Dashboard Monitoring* ekspor-impor, sehingga proses simplifikasi prosedur masih berjalan parsial.
2. Terhambatnya proses pengambilan keputusan strategis dalam penyelarasan regulasi tata niaga akibat asimetri pemahaman dan ego sektoral antar-pemangku kepentingan terkait prosedur pemenuhan kewajiban perdagangan di lapangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan eskalasi koordinasi tingkat tinggi untuk mendorong pemenuhan user akses serta validasi pembaruan data secara berkala dari

tiap K/L pengampu perizinan pada *Dashboard Monitoring* ekspor dan impor.

2. Diperlukan sosialisasi dan asistensi teknis berkelanjutan melalui Sekretariat Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP) guna menyamakan persepsi regulasi dan mempercepat implementasi pemotongan birokrasi prosedur perdagangan.
3. Mengoptimalkan fleksibilitas pertemuan melalui media virtual (*Zoom*) atau penyediaan forum luar kantor yang representatif demi menjaga kesinambungan pembahasan teknis penyederhanaan prosedur.

Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*. Oleh karena itu pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Fasilitas Perdagangan yang efektif perlu dilakukan agar dapat memberikan dampak yang optimal dan memiliki nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Fasilitas Perdagangan adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asdep Fasilitas Perdagangan kepada oleh kementerian/lembaga mendapatkan hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Fasilitas Perdagangan **belum dapat diketahui realisasi kinerjanya** karena penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir triwulan II dan triwulan IV.

Namun jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada triwulan I 2026, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target triwulan I dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4* (Baik)	100% (Memuaskan)

*) Data sementara (TW 4 2025)

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan 3 dari 4 (Baik). Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan periode sebelumnya (triwulan 4 2025), dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor mendapatkan hasil **3 dari 4 (Baik)**.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diproyeksikan dapat dilaksanakan dan memperoleh nilai yang diharapkan pada triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksana	Telah dilakukan serangkaian persiapan dalam mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya **mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan**, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(RB) Asisten Deputi

Fasilitas

Perdagangan dan

Pengembangan

Ekspor

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib

didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Tahun 2026 adalah sebesar 92%. Target tersebut dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Adapun target triwulan I 2026 adalah sebesar 20% dengan target capaian telah tersusunnya beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 27,27% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan	Persentase	Tahunan: 92% TW I: 20%	20%	100% (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Dimana telah dilakukan penyusunan beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi RB General yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam penyusunan beberapa kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja, serta Manual IKU level eselon II.
2. Telah terselesaikannya penyusunan dan penetapan tim kerja.
3. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen laporan kinerja triwulanan level eselon II.

4. Telah dilakukan penyusunan TOR dan RAB revisi Renja 2026.
5. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan di Keasdepan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Sampai dengan akhir triwulan I Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan I, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan tim kerja yang terdiri dari 3 tim
2.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU Eselon II
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I sesuai waktu yang ditentukan
4.	Penyusunan Renja 2026		Telah dilaksanakan penyusunan Renja tahun 2026 sesuai waktu yang ditentukan
5.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan implementasi dan optimalisasi penggunaan Srikandi dalam persuratan di unit keasdepan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya **mengurangi**

penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2026

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan
dan Pengembangan Ekspor



Ekko Harjanto